



TATAKELOLA KOLABORATIF HEXA HELIX DALAM PENGELOLAAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA BOGOR

Sunardi¹, Darmanto², Sandra Sukmaning Adjie³

s.nardus@gmail.com¹, darmanto@ecampus.ut.ac.id², sandra@ecampus.ut.ac.id³

Universitas Terbuka

Abstrak: Kota Bogor dikenal sebagai penyangga Ibukota Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan, dimana disatu sisi merupakan kekayaan, akan tetapi juga menjadi sumber konflik. Tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi Beragama menjadi relevan mengingat kompleksitas faktor yang terlibat membutuhkan kerangka kerja yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan lembaga terkait lainnya, untuk bekerja sama dalam mengelola dan mempromosikan toleransi beragama. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan toleransi Beragama. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis tata kelola kolaboratif hexa helix dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan toleransi beragama di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan toleransi Beragama di Kota Bogor menggunakan kerangka kolaboratif Hexa Helix, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menunjukkan peran yang sangat kuat, berkontribusi secara signifikan terhadap inisiatif kolaboratif. Media massa juga berperan kuat dalam mendukung penyebaran informasi. Namun, peran badan usaha dan akademisi masih lemah dan perlu ditingkatkan. Komunitas terdampak memiliki peran yang sedang, yang menunjukkan kebutuhan akan dorongan tambahan untuk keterlibatan mereka.. Faktor pendukung utama mencakup kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang kompeten, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media massa. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan keterbatasan dalam keterlibatan badan usaha dan universitas/akademisi, serta hambatan seperti keterlambatan menerjemahkan produk peraturan daerah dalam kebijakan operasional, kurangnya visi dan inovasi kolaboratif dari pemerintah kota dan keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan toleransi beragama, perlu memperkuat keterlibatan badan usaha, akademisi, dan komunitas terdampak'.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Hexa Helix, Intoleransi, Masyarakat Sipil, Ketahanan.

Abstract: Bogor City is known as a supporting city for Indonesia's capital, with its diversity of ethnicities, religions, races and groups, which on the one hand is wealth and power, but it is often also a source of conflict. Collaborative governance in managing religious tolerance in Bogor City becomes relevant considering the complexity of factors involved, requiring a framework that engages various stakeholders, including the government, civil society, private sector, religious leaders, media and other related institutions, to work together in managing and promoting inter-religious tolerance. In practice, there are several challenges faced in collaborative governance for managing religious tolerance. The objective of this research is to analyze the Hexa Helix collaborative governance and examine the supporting and inhibiting factors in collaborative governance in managing religious tolerance in Bogor City. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study method. The research findings indicate that in managing religious tolerance in Bogor City using the Hexa Helix collaborative framework, the

government, religious leaders, and non-governmental organizations/civil society (NGOs/CSOs) play a very strong role, contributing significantly to collaborative initiatives. The mass media also plays a fairly strong role in supporting the dissemination of information. However, the role of businesses and universities/academics remains weak and needs improvement. The impacted community and religious leaders have a moderate role, indicating the need for additional encouragement for their engagement. To achieve maximum effectiveness in managing religious tolerance, efforts are needed to strengthen the involvement of businesses, academics, and the affected community within this collaborative framework. Key supporting factors include strong leadership, competent bureaucracy, and active participation from civil society and mass media. On the other hand, inhibiting factors involve limited involvement of businesses and universities/academics, along with obstacles such as delays in translating regional regulations into operational policies, lack of vision and collaborative innovation from the city government, and budget constraints.

Keywords: Collaborative Governance, Civil Society, Hexa Helix, Intolerance, Resilience.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang menggambarkan keberagaman budaya yang dimiliki oleh seluruh warga negaranya. Di negara Indonesia ini pemerintah mengakui enam agama secara resmi yaitu pertama Islam sebagai agama mayoritas. Kemudian Kristen protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu (Rosyad dkk, 2021: 26).

Fenomena tentang intoleransi yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu pada November 2019, SETARA Institute menyebut Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, dari 2015 hingga 2019, tercatat ada 162 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Jawa Barat, angka yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Hakim, 2022).

Hasil Survei Indeks Kota Toleransi oleh SETARA Institut secara nasional yang dirilis pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2020, mengemukakan bahwa Kota Bogor berada di peringkat 92 dari 94 - kategori kota intoleran- (2017), 88 (2018) dan 67 (2020). Hasil laporan tahun 2018 yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2015, menetapkan 10 besar kota di Jawa Barat sebagai kota intoleran. Tujuh dari 10 kota tersebut adalah Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya. Kota Bogor dan Bekasi ditetapkan sebagai dua kota yang tingkat intoleransinya paling tinggi. Survei tersebut juga menempatkan kota Bogor berada pada deretan teratas kota dengan intoleransi tinggi dengan skor sebesar 5,21, yang disusul kota Bekasi dengan skor intoleransi sebesar 4,68 (Haryani, 2019).

Konflik keberagamaan lainnya yang terjadi di Kota Bogor yaitu isu Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan pembangunan Masjid Imam bin Hambal. Pada tahun 2006, GKI Yasmin ini mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah setempat. Namun, pada tahun 2008 izin tersebut dicabut oleh pemerintah Kota Bogor setelah adanya protes dari sekelompok warga. Permasalahan ini berjalan dengan cukup berlarut-larut hingga 15 tahun, dan juga sempat menjadi isu internasional serta Kota Bogor dinilai sebagai kota intoleran (Bogor Channel, 2021). Pada kasus Masjid Imam Bin Hambal, seperti halnya pada kasus GKI Yasmin, yaitu juga terkait dengan isu toleransi beragama dan hak minoritas, meskipun dalam konteks ini yang menjadi objek adalah komunitas Muslim (Bogor Channel, 2021).

Sejak tahun 2021, Kota Bogor telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perjalanannya menuju menjadi kota yang lebih toleran. Melalui upaya tata kelola kolaborasi yang inklusif, seluruh pemangku kepentingan, tanpa terkecuali, telah dirangkul untuk berpartisipasi dalam membangun kota yang lebih harmonis dan

toleran. Hasil survey SETARA Institut menunjukkan Indeks Toleransi Kota Bogor telah meningkat tajam sejak tahun 2021, menjadi peringkat 33 dan terus bergerak naik di tahun 2022 di peringkat ke-17 dan berada pada tahun 2023 berada di peringkat 12. Peningkatan pengelolaan toleransi beragama di Kota Bogor ditengarai karena mulai terbentuknya kolaborasi para pihak.

Kolaborasi adalah hal yang penting dalam merawat toleransi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, pelaku usaha, tokoh agama dan akademisi serta pihak lainnya menjadi penting dilaksanakan agar kerukunan intra dan antar umat beragama dapat terus terjaga dan diperkuat. Salah satu aspek penting dari tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi beragama adalah pembentukan forum atau platform dialog dan memperbanyak ruang pertemuan para pihak. Melalui dialog ini, perbedaan pandangan dan kepentingan dapat dipertemukan dan diselesaikan secara konstruktif, sehingga memungkinkan terciptanya solusi-solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari latar belakang tersebut diatas penelitian ini dilakukan. Masalah penelitian dirumuskan untuk menjawab bagaimana tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi keberagamaan di Kota Bogor? Kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi keberagamaan di Kota Bogor?

Dalam penelitian ini akan menggunakan Model Ansel & Gash serta teori Kolaborasi Hexa Helix, dimana kolaborasi ini merupakan salah satu model kolaborasi yang terdiri dari 6 (enam) aspek pemerintahan dan non pemerintahan, yaitu Pemerintah (Government), Dunia usaha (Business), Akademisi (Academician), Organisasi non Pemerintah (NGO), Media Massa (Mass Media), serta masyarakat yang terdampak. Adapun unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian ini antara lain, belum ada penelitian terkait dengan toleransi keberagamaan menggunakan kerangka pendekatan tata kelola kolaborative (collaborative governance). Kedua, pengelolaan toleransi keberagamaan menggunakan hexa-helix collaborative governance. Secara umum ada dua hal penting tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola kolaboratif hexa helix dalam pengelolaan toleransi beragama di Kota Bogor dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi beragama di Kota Bogor.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, eksploratif dan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber informasi yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu diperoleh dari hasil observasi peneliti di lapangan, serta hasil wawancara dengan informan penelitian. Teknik menentukan informan dilakukan dengan purposive sampling. Informan yang dipilih adalah Pejabat Daerah/Dinas, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil/Tokoh Masyarakat, Media, dan Kelompok terdampak. dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 17 informan.

Kemudian untuk sumber sekunder, diperoleh peneliti dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, peraturan dan kebijakan daerah, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dokumen terkait, serta bahan-bahan publikasi lainnya baik yang tercetak maupun elektronik.

Instrumen pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang didasarkan

pada pendapat Miles dan Huberman, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik ketekunan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Kolaboratif Hexa Helix Dalam Pengelolaan Toleransi Keberagamaan di Kota Bogor

Dalam menganalisis temuan penelitian ini, pendekatan kolaborasi akan dikelompokkan sesuai dengan unsur-unsur collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansel & Gash. Pertama, starting condition atau kondisi awal meliputi tingkat kepercayaan, konflik, sejarah kerjasama serta kontribusi dan alokasi sumber daya yang menjadi fondasi penting dalam memulai kolaborasi. Kedua, desain kelembagaan mengacu pada perlunya partisipasi inklusif, protokol dan legitimisasi prosedural kelembagaan. Ketiga, unsur proses atau inisiatif kolaborasi memainkan peran penting dalam bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan, melalui dialog dan saling pengertian. Keempat, kepemimpinan yang human centric, dan kerja tim yang efektif menjadi faktor kunci dalam mengarahkan kolaborasi ini.

Dalam hal ini, model Hexa Helix menawarkan sebuah kerangka kolaborasi yang melibatkan enam aktor utama, yakni pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat sipil, media, dan kelompok terdampak (kelompok agama minoritas). Kerangka ini memungkinkan adanya sinergi antar berbagai sektor dalam menjaga dan mengembangkan kerukunan di tengah masyarakat urban yang majemuk (plural). Namun, implementasinya tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi ini.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal menunjukkan adanya sikap, kemauan, keterbukaan dan kontribusi yang berbeda dari berbagai pihak dalam kolaborasi Hexa Helix untuk membangun toleransi beragama di Kota Bogor. Bahkan sikap para pejabat daerah tidaklah sama. Rendahnya tingkat kepercayaan (trust) menjadi tantangan penting di awal kolaborasi, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil dan sebaliknya. Pemimpin politik dan birokrasi cenderung prejudice dan stereotype dalam melihat peran Organisasi Non Pemerintah yang dianggap oposan dan vis a vis terhadap kebijakan pemerintah dan incompetence dalam aspek teknis. Selain hal tersebut, masih terdapat tantangan dalam hal alokasi sumber daya yang memadai, terutama bagi OMS dan akademisi. Komunikasi dan koordinasi dalam membangun kolaborasi belum berjalan sebagaimana mestinya, karena terbatasnya platform kolaborasi yang mempertemukan para pihak yang berorientasi konsensus, tidak bersifat hirarki dan komunikasi multiarah,

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa pemahaman awal terkait isu keberagaman dan toleransi di Kota Bogor berkembang dari yang bersifat individual dan sektoral menjadi lebih kolektif dan terkoordinasi. Dari kondisi low-trust para pihak antara pemerintah dengan Masyarakat sipil dan sebaliknya mampu teratasi dengan komunikasi, dialog dan kerjasama. Transformasi ini sesuai dengan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, di mana proses kolaborasi memerlukan trust-building, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan bersama. Tidak ada perbedaan substansi dan ideologis dalam pengelolaan isu toleransi beragama antar OMS, meski pendekatan beragam dalam kontinum kooperasi atau kritikal, akan tetapi kolaborasi disepakati sebagai instrumen penting. Table di bawah ini menggambarkan kondisi awal kolaborasi dilihat dari perspektif actor Hexa-Helix.

Tabel 1
Kondisi Awal Dalam Pengelolaan Toleransi Keberagamaan

No	Aktor Hexa Helix	Kondisi Awal (<i>trust</i> antar pemangku kepentingan)
1	Pemerintah	<i>Trust</i> Lemah kepada pemangku kepentingan lainnya khususnya masyarakat sipil (OMS). Birokrasi belum terkonsolidasi secara solid dan pemahaman terbatas tentang HAM, inklusi dan toleransi. Pemerintah daerah, meskipun diakui memiliki peran dan tanggung jawab terbesar, masih mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk isu toleransi.
2	Swasta	Berkontribusi melalui CSR, namun belum menjadikan isu toleransi sebagai prioritas utama
3	Akademisi	Lebih fokus pada kajian akademis, sementara kontribusi nyata di lapangan masih terbatas.
4	OMS	Menjadi pihak yang paling dominan dalam mendorong dan memicu (<i>triggering</i>) kolaborasi keberagamaan, kontribusi sumber daya, namun menghadapi kendala keterbatasan dana dan SDM.
5	Media	Berperan dalam advokasi dan penyebaran informasi, memaknai perjumpaan dan kerjasama menjadi aksi bersama, namun alokasi sumber dayanya terbatas pada kapasitas tersebut
6	Komunitas terdampak	Termotivasi oleh tanggung jawab moral dan spiritual mereka untuk menjaga kerukunan umat namun menghadapi kendala dalam memobilisasi sumber daya dan dukungan dari komunitas mereka. Meningkatkan tingkat kepercayaan diri (<i>konfiden</i>) sebagai miniroitas, telah ikut serta dalam selebrasi perbedaan dan keberagaman dalam hari toleransi dan praktek hidup sehari-hari.

b. Desain kelembagaan

Kondisi eksisting desain kelembagaan menekankan pentingnya keberadaan kelembagaan yang kuat di setiap stakeholder untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Partisipasi internal dan antar-stakeholder telah berjalan bersifat inklusif dan terbuka, bukan eksklusif atau tertutup, hal ini menjadi enabling dalam menciptakan lingkungan kerja sama yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, di setiap stakeholder, perlu dibentuk protokol atau aturan dasar yang mengatur mekanisme kolaborasi.

Desain kelembagaan di Kota Bogor menunjukkan potensi yang baik dalam mendukung kolaborasi untuk pengelolaan toleransi keberagamaan. Pengelolaan lembaga dan program para pihak bersifat inklusi, namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal inclusive mindset semakin diperluas penguatan kelembagaan melalui prosedur operasional, peningkatan partisipasi, dan perluasan upaya mainstreaming isu toleransi di berbagai sektor serta keterlibatan kalangan rentan (Most vulnerable), khususnya Perempuan, pemuda dan kalangan difabel.

Tabel 2, memberikan gambaran bahwa integrasi pengelolaan toleransi beragama telah memiliki payung regulasi yang kokoh melalui peraturan daerah dan rencana jangka Panjang (RPJP) dan menengah pembangunan daerah (RPJMD) akan tetapi belum diikuti oleh kebijakan turunan seperti Peraturan Walikota (Perwali) atau Rencana Aksi Daerah (RAD), sebagai acuan proses programming dan penganggaran di tingkat OPD. Masyarakat sipil, pelaku bisnis dan komunitas

terdampak perlu mengembangkan struktur yang memungkinkan lembaga berelasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lain lebih lentur fungsional, inklusif dan tidak elitis serta melibatkan kalangan perempuan dan muda.

Tabel 2

Desain Kelembagaan Dalam Pengelolaan Toleransi Keberagamaan

No	Aktor Hexa Helix	Tingkat Efektifitas Desain Kelembagaan
1	Pemerintah	Pemerintah memberikan ruang luas, menguatkan birokrasi dari sisi paradigma, pemahaman dan pengelolaan toleransi, lahirnya Peraturan Daerah dan draft kebijakan pelaksana serta telah mengintegrasikan prioritas pengelolaan toleransi dalam draft dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD 2024-2044), jangka menengah (RPJMD & Renstra OPD) dan jangka pendek (RKPD dan Renja). Struktur kelembagaan OPD memadai akan tetapi belum ada protokol kolaborasi dan dipahami secara menyeluruh oleh seuruh OPD, baru OPD leading sektor (Kesbangpol, Bapperinda) dan Biro Hukum sehingga tidak berfungsi secara optimal.
2	Swasta	Perusahaan di Kota Bogor telah cukup efektif dalam menerapkan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman dalam pengelolaan internal mereka, namun perluasan partisipasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal masih perlu ditingkatkan.
3	Akademisi	Desain kelembagaan yang melibatkan akademisi dinilai efektif, namun perluasan peran mereka dalam advokasi kebijakan dan pengabdian masyarakat terkait toleransi masih diperlukan.
4	OMS	Struktur kelembagaan OMS dianggap responsif dan antusias, memfasilitasi kolaborasi dan pengelolaan toleransi beragama, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan konflik namun efektivitasnya terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM diperlukan
5	Media	Struktur dan prosedur yang dimiliki organisasi media dinilai cukup efektif dalam berperan serta menyebarkan pesan toleransi dan kolaborasi dan terlibat dalam proses kolaborasi dan pengelolaan toleransi beragama,
6	Komunitas terdampak	Struktur kelembagaan di tingkat komunitas terdampak dianggap cukup memadai meski perlu peningkatan kapasitas, serta perlu adanya peningkatan proaktivitas dari pimpinan agama dalam menggalang komunikasi dan kolaborasi, dan meninggalkan dan menanggalkan perasaan minority dan kelompok yang tidak diperhitungkan.

c. Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan tahapan di mana berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi melibatkan interaksi yang dinamis antara individu atau kelompok yang berbeda, berbagi informasi, ide, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Proses kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor ini mencerminkan pemahaman

bahwa keberagaman sosial dan toleransi beragama memerlukan kerjasama yang efektif, keterlibatan aktif, dan komunikasi yang terbuka antara semua pihak terkait. Hal ini sesuai dengan teori Ansel & Gash bahwa proses kolaborasi adalah tahapan di mana berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Tabel 3 menjelaskan adanya inisiatif kolaborasi yang datang dari semua aktor Hexa Helix, platform pertemuan/dialog, telah diinisiasi oleh para pihak. Masyarakat sipil cukup dominan dalam melahirkan forum dan ruang pertemuan toleransi. Beberapa inisiatif membangun keberagaman melalui aksi telah terlembagakan dan sustain, seperti Festival Merah Putih, Bogor Bersih dan Bogor Street Festival, yang telah berjalan lebih dari satu dekade pelaksanaannya. Selain itu Masyarakat sipil juga telah melahirkan platform pertemuan lintas agama, seperti Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA), Forum Muda Lintas Agama (FORMULA), Forum Bogor Damai Sejahtera (FORBODAS), Forum diskusi Gusduriyan dan lainnya. FORBODAS yang dimotori oleh Yayasan Metamorfosis berkolaborasi dengan pemerintah daerah telah menginisiasi model percontohan (modelling) Kelurahan Toleransi Inklusi di dua lokasi, Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Katulampa. Dimana melalui percontohan ini telah lahir Kader Penggerak Kerukunan (KPK) tingkat Kelurahan.

Dari pemerintah termasuk di dalamnya organisasi/forum quasi pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan (KPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FBK)). Forum-forum tersebut berperan penting merekatkan rasa kebangsaan dan kesatuan serta menangkal radikalisme. Kelemahannya, sangat bergantung dengan sumber pembiayaan dari pemerintah daerah dan cenderung top-down.

Intensitas keterlibatan akademisi dan pelaku usaha sangat diperlukan dalam menyiapkan pengetahuan, data dan pilihan kebijakan serta kontribusi sumberdaya lainnya. Perluasan keterlibatan kelompok minoritas, marginal, rentan, difabel dan pemuda penting agar inklusifitas dan tidak ada yang ditinggalkan (no one left behind).

Tabel 3

Inisiatif Kerjasama Dalam Pengelolaan Toleransi Keberagaman

No	Aktor Hexa Helix	Inisiatif Kerjasama Dalam Membangun Kolaborasi
1	Pemerintah	Pemerintah daerah secara aktif terlibat dalam kegiatan kolaboratif, melalui organisasi bentukan pemerintah maupun tergabung kedalam inisiatif dialog masyarakat sipil; menerapkan pendekatan inklusif, dan terbuka terhadap masukan publik.
2	Swasta	Perusahaan relatif kurang terlibat dalam proses dialog dengan pemangku kepentingan lain. Partisipasi mereka lebih banyak dalam bentuk kegiatan sosial dan dukungan terhadap pengelolaan forum-forum yang ada.
3	Akademisi	Secara terbatas akademisi terlibat aktif dalam dialog mingguan dan bulanan dengan berbagai pihak, berperan sebagai fasilitator pemahaman dan ikut serta bersama masyarakat sipil dalam menyediakan bukti/data serta mendorong proses integrasi isu toleransi dalam kebijakan daerah.
4	OMS	OMS berperan sebagai jembatan para pihak dan penggerak masyarakat, memfasilitasi dialog dan advokasi kebijakan, mediasi konflik beragama,

		penguatan daya tahan (<i>resiliensi</i>) berbasis komunitas, memperkuat masyarakat pada isu toleransi, inklusi dan HAM serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah dan masyarakat sipil.
5	Media	Media menyediakan platform untuk dialog dan resolusi konflik, mendorong komunikasi terbuka, dan menyuarakan keberagaman tanpa membedakan sumber.
6	Masyarakat terdampak	Tokoh agama aktif terlibat dalam dialog dan koordinasi, menggunakan forum-forum formal dan informal untuk menangani konflik dan memfasilitasi komunikasi antaragama

d. Kepemimpinan Dalam Isu Toleransi (Kepemimpinan Fasilitatif/ Termasuk Aspek Pemberdayaan)

Kepemimpinan dalam isu toleransi berperan penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi antar-stakeholder. Kepemimpinan kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan proses kelompok yang harmonis, meningkatkan kerja tim yang produktif, dan memfasilitasi manajemen perubahan yang adaptif. Selain itu, setiap sektor yang terlibat dihargai atas kualitas individu dan tim, serta didorong untuk terus berkembang melalui pengembangan berkelanjutan dalam kerangka kolaborasi yang saling mendukung.

Kepemimpinan dalam isu toleransi di Kota Bogor melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Kepemimpinan politik Walikota Bima Arya memberikan ruang luas partisipasi para pihak. Sedangkan birokrasi seperti Bagian Hukum dan HAM mendorong lahirnya Perda Ramah HAM, Perda Balai Badami (restoratif justice) dan Perda Pelindungan Disabilitas serta freezing Perda pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang dianggap diskriminatif oleh sejumlah pegiat kemanusiaan. Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol menerapkan pendekatan kepemimpinan yang *emphatic*, *collaborative* dan *empowering* dengan merangkul dan memberikan penghargaan kepada OMS, melatih dan mengembangkan kemandirian ekonomi serta memperkuat manajemen dan kapasitas organisasi OMS. Lembaga Mitra Pembangunan Internasional berperan penting dalam menjembatani kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan Masyarakat sipil, melalui penguatan kapasitas kedua belah pihak.

Tabel 4
Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Toleransi Keberagaman

No	Aktor Hexa Helix	Level Kepemimpinan
1	Pemerintah daerah	Kepemimpinan politik telah mendorong hadirnya regulasi dan integrasi isu ke dalam proses teknokratik serta pemahaman yang lebih baik birokrasi dalam hal HAM, toleransi dan inklusi. Ditingkat birokrasi Kepala Kesbangpol dan Kepala Biro Hukum & HAM, menunjukkan pendekatan yang empatik dan kolaboratif dan mendorong hasil. Pelembagaan menjadi tantangan penting kedepan.
2	Swasta	Sektor swasta menunjukkan dukungan terhadap kebebasan beragama dan inisiatif keberagaman, namun belum terlibat dalam dialog langsung dengan masyarakat sipil dan pemerintah. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang pasif dalam isu toleransi.

3	Akademisi	Kepemimpinan dalam isu toleransi lebih sebagai sebagai participant aktif.
4	OMS	OMS memiliki peran aktif dalam membentuk ruang dialog, memfasilitasi dialog dan resolusi terhadap konflik keagamaan, melibatkan berbagai kelompok, memobilisasi sumber daya, dan membangun menjembatani kepercayaan para pihak.
5	Media	Media massa berperan signifikan dalam membentuk opini publik dan menjaga kepercayaan publik melalui forum informal dan pengaruhnya
6	Masyarakat terdampak	Tokoh agama, baik Katolik maupun Budha, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam membentuk platform dialog antar agama, mendukung dialog antaragama secara rutin, berkontribusi menyediakan sumberdaya, serta membangun kepercayaan dan koordinasi dalam masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Tata Kelola Kolaboratif Hexa Helix Dalam Pengelolaan Toleransi Beragama di Kota Bogor

Tata kelola kolaboratif untuk mempromosikan toleransi beragama di Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan yang terbuka, masyarakat sipil yang aktif, dan media yang proaktif, sementara faktor penghambat mencakup kelemahan penerjemahan visi dalam implemementasi, efektifitas leading sector dalam koordinasi dan sinkronisasi kerja lembaga terkait isu toleransi, dan keterbatasan sumber daya. Pemahaman dan strategi yang tepat dalam menangani tantangan ini, serta memperkuat faktor pendukung, sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam upaya mempromosikan toleransi beragama di Kota Bogor.

Dalam kerangka Hexa Helix, peran dari berbagai aktor dalam mempromosikan toleransi beragama di Kota Bogor dapat dianalisis menggunakan teori Ansel dan Gash. Teori ini memberikan panduan tentang bagaimana berbagai aktor berinteraksi dalam sebuah kolaborasi yang kompleks untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan analisis, peran masing-masing aktor dalam kerangka ini terlihat sebagai berikut:

Peran pemimpin politik dan birokrasi dapat dikategorikan cukup kuat. dalam memainkan peran tata kelola kolaboratif untuk mempromosikan toleransi beragama. Peran badan usaha atau sektor swasta dalam kolaborasi ini masih relatif lemah. Dalam teori Ansel dan Gash, sektor swasta dapat dilihat sebagai aktor yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan tetapi membutuhkan dorongan lebih lanjut untuk berpartisipasi aktif.

Universitas/Akademisi dapat dikategorikan masih tergolong lemah. Teori Ansel dan Gash menunjukkan bahwa akademisi dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan inovasi, namun mereka sering kali terjebak dalam keterbatasan sumber daya dan kesibukan masing-masing. Organisasi Non Pemerintah/Masyarakat Sipil (OMS) dikategorikan sangat kuat. Menurut teori Ansel dan Gash, OMS berfungsi sebagai aktor yang mendukung pembentukan kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pihak. Komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, serta kemampuan mereka dalam melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut, menjadikan OMS sebagai komponen vital dalam tata kelola kolaboratif ini dan menjaga keberlangsungannya.

Media Massa dapat dikategorikan cukup kuat. Teori Ansel dan Gash menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam kolaborasi, dan media massa perlu memperbaiki cara mereka berkomunikasi serta beradaptasi dengan perubahan dalam

preferensi audiens. Komunitas Terdampak/Tokoh Agama minoritas dikategorikan Sedang. Teori Ansel dan Gash menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dan komunitas dalam dialog terbuka dapat meningkatkan kolaborasi, namun mereka perlu didorong untuk lebih percaya diri, dan berperan lebih aktif dalam menjembatani berbagai kelompok dan mendukung inisiatif kolaboratif secara lebih luas.

Keseluruhan kerangka Hexa-Helix menunjukkan keberhasilan kolaborasi dalam mempromosikan toleransi beragama sangat tergantung pada interaksi efektif antara semua aktor. Pemerintah sebagai aktor utama perlu terus memperkuat peran mereka, sementara badan usaha dan universitas harus meningkatkan keterlibatan mereka. OMS dan media massa memiliki peran krusial yang harus terus didorong, dan komunitas terdampak serta tokoh agama perlu diberikan dukungan lebih agar dapat berkontribusi secara optimal. Dengan mengoptimalkan peran masing-masing aktor, diharapkan kerangka Hexa Helix dapat berfungsi secara maksimal dalam mempromosikan toleransi beragama di Kota Bogor.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan toleransi keberagamaan di Kota Bogor menggunakan kerangka kolaboratif Hexa Helix, pemerintah, tokoh agama dan organisasi non-pemerintah/masyarakat sipil (OMS) menunjukkan peran sangat kuat, berkontribusi signifikan terhadap inisiatif kolaboratif. OMS menjadi pihak yang secara kuat mendorong pemerintah daerah dan para pihak lainnya bekerja kolaboratif dalam isu toleransi keberagamaan. Media massa juga berperan cukup kuat. Namun, peran badan usaha dan universitas/akademisi masih lemah dan perlu ditingkatkan. Komunitas terdampak dan tokoh agama memiliki peran yang sedang. Faktor pendukung utama mencakup kepemimpinan politik yang terbuka dan kuat, birokrasi yang kompeten, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media massa serta fasilitasi lembaga mitra pembangunan internasional. Faktor penghambat melibatkan keterbatasan dalam keterlibatan badan usaha dan akademisi, keterlambatan menerjemahkan produk peraturan daerah dalam kebijakan operasional, kurangnya visi dan inovasi kolaboratif, dan keterbatasan anggaran.

Pemerintah perlu memfasilitasi sinergi antara sektor-sektor ini melalui kebijakan yang inklusif dan dukungan anggaran yang memadai, dan pelembagaan forum-forum dialog toleransi dan kerjasama para pihak, sementara media massa perlu keterlibatan lebih luas baik media mainstream dan media sosial serta aktif menyebarluaskan nilai toleransi dan inklusi. Selain itu, penguatan kapasitas birokrasi, organisasi masyarakat sipil dan universitas dalam menyusun dan melaksanakan program-program toleransi akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan kolaborasi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansel, Crish dan Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. University of California, Berkley (543-571)
- Arrozaq, D.L.C (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal*. 1-13.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, 187-198.
- Ervianti, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Menghambat Collaborative Governance Dalam

- Implementasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, Vol. 5, Edisi II, 1-13.
- Gifari, G. Pernah Jadi Kota Intoleran se-Indonesia Kini Bogor Jadi Kota Toleran. Diunduh 7 Maret 2023, dari situs World Wide Web: <https://ruangbogor.com/detail/1611/pernah-jadi-kota-intoleran-seindonesia-kini-bogor-jadi-kota-toleran>
- Hakim, W. (2022). Jawa Barat: Antara Stigma Intoleran dan Kesadaran Berpancasila. Jakarta: Repository Universitas Al Azhar Indonesia.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan-Sumatera Utara: Wal ashri Publishing.
- Hardani, Andriani, H. Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J., & Auliya, N.H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryani, E. (2019). Intoleransi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama Di Kota Bogor, Jawa Barat. Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 18 No. 2, 282-299.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Malawat, S.H. (2022). Pengantar Administrasi Publik. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Nasution, A.F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: Bildung.
- Nugraha, Y., & Firmansyah, Y. (2019). Karakter Toleransi Beragama dalam Sudut Pandang Generasi Milenial. Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2, 69-76.
- Paat, Y.P. (2015). Bogor Kota Paling Intoleran Versi Setara. Diunduh 5 Maret 2023, dari situs World Wide Web: <https://www.beritasatu.com/news/322494/bogor-kota-paling-intoleran-versi-setara>
- Pamungkas, A.S., Bahari, Y., & Imran. (2021). Analisis Pelaksanaan Toleransi Beragama Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 10, No. 12, 1-8.
- Panjaitan, D.T.M.R., & Pardede, P.D.K. (2021). Administrasi Publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Prasetyo, E., Utami, P., & Amanda, T.A. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 3, 276-296.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik. Jakarta” Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Rosyad, R., Mubarak, M.F.Z., Rahman, M.T., & Huriani, Y. (2021). Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial. Bandung: LEKKAS.
- Sahir, S.H. (2022). Metodologi Penelitian. Bantul-Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI.
- Saliro (2019). Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Singkawang. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 17, No. 2, 283-296.
- Sugiyono (2024). Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Penerbit Alfabeta Anggota IKAPI.
- Umam, F. (2013). Kala Beragama Tak Lagi Merdeka. Jakarta: Gramedia.
- Watra, I.W. (2015). Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama dan Kebudayaan). Surabaya: Paramita.
- Wenger, E., & Wenger-Trayner, B. (2015). Communities of Practice a Brief Introduction. Diunduh 7 Maret 2023, dari situs World Wide Web: <https://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/>
- Widanti, N.P.T. (2022). Prinsip Administrasi Publik. Denpasar: Jagat Langit Sukma.

Yosarie, Ikhsan. dkk. (2024). Indeks Kota Toleran 2023. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.